

**PEMBENTUKAN KEMENTERIAN DI ERA PEMERINTAHAN  
PRABOWO SUBIANTO DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP  
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN**

**SKRIPSI**

**Oleh  
Nasywa Salma  
NIM. 05010422014**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara  
Surabaya  
2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasywa Salma  
NIM : 05010422014  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Pembentukan Kementerian Di Era Pemerintahan Prabowo Subianto Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 Februari 2026



**Nasywa Salma**  
NIM. 05010422014

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nasywa Salma

NIM : 0510422014

Judul : Pembentukan Kementerian Di Era Pemerintahan Prabowo Subianto  
Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Efektivitas Dan Efisiensi  
Penyelenggaraan Pemerintahan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang  
munaqasah skripsi.

Surabaya, 10 Februari 2026

Pembimbing,



**Dr. Lutfil Ansori, M.H**  
NIP. 198311132015031001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nasywa Salma


NIM. : 05010422014

Judul : Pembentukan Kementerian Di Era Pemerintahan Prabowo Subianto Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 04 Maret, 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

### Majelis Munaqasah Skripsi

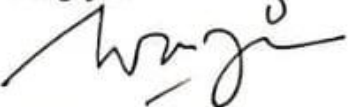
Penguji I

  
**Dr. Lutfil Ansori, M.H.**  
NIP. 198311132015031001

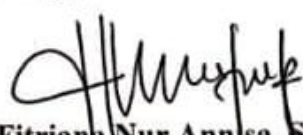
Penguji III

  
**Elva Intekatur Rohmah, S.H.I, M.H**  
NIP. 199204022020122018

Penguji II

  
**Prof. Dr. Sri Warjiati, MH**  
NIP. 196808262005012001

Penguji IV

  
**Fitriana Nur Annisa, S.H., M.Kn.**  
NIP. 199901012025042004

Surabaya, 2 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,  
  
**Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.**  
NIP. 196303271999032001





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Naasywa Salma

NIM : 05010422014

Fakultas/Jurusan: Syariah dan Hukum/Jurusan Hukum Publik Islam/ Prodi Hukum Tata Negara

E-mail address : [nasywasalma04@gmail.com](mailto:nasywasalma04@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain ( .....

yang berjudul :

Pembentukan Kementerian Di Era Pemerintahan Prabowo Subianto Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 April 2026  
Penulis

(Nasywa Salma)

## ABSTRAK

Pembentukan kementerian pada masa Presiden Prabowo Subianto pasca perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 menunjukkan dinamika baru dalam sistem presidensial, terutama terkait perluasan kewenangan presiden dalam menentukan jumlah dan susunan kementerian. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas, efisiensi, serta kesesuaiannya dengan konsep masalah mursalah dalam fiqh siyāsah. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji apakah struktur dan jumlah kementerian telah mencerminkan prinsip efektivitas dan efisiensi serta sejalan dengan masalah mursalah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait kementerian negara, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan dan penataan kementerian pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara yuridis memiliki landasan hukum yang sah. Namun, dari perspektif efektivitas dan efisiensi, kebijakan tersebut belum sepenuhnya didasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga berpotensi menimbulkan pembengkakan birokrasi, tumpang tindih kewenangan, serta peningkatan beban anggaran negara. Dalam perspektif fiqh siyāsah, pembentukan kementerian dapat dibenarkan berdasarkan prinsip masalah mursalah selama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut sangat bergantung pada implementasi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar pembentukan dan penataan kementerian dilakukan secara proporsional, dengan memperhatikan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan, kejelasan indikator efektivitas dan efisiensi, serta kemampuan keuangan negara. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap kinerja kementerian untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan kemaslahatan umum.

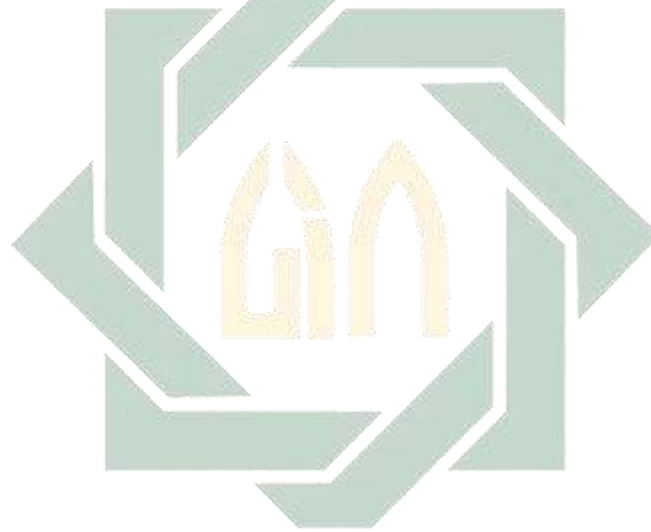
## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Landasan Teori.....	17
H. Definisi Operasional .....	23
I. Metode Penelitian .....	26
J. Sistematika Pembahasan.....	31
<b>BAB II KONSEP PEMBENTUKAN KEMENTERIAN BERDASARKAN TEORI PEMISAH KEKUASAAN, SISTEM PEMERINTAHAN, TATA KELOLA PEMERINTAH YANG DAN MAŞLAĦAH MURSALAH</b> .....	<b>33</b>
A. Teori Pemisah Kekuasaan dan <i>Checks dan Balances</i> .....	33
B. Teori Sistem Pemerintahan .....	36
C. Teori Tata Kelola Pemerintah Yang Baik ( <i>Good governance</i> ) .....	39
D. Teori <i>Maşlahah mursalah</i> .....	44
<b>BAB III PEMBENTUKAN KEMENTERIAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PRINSIP EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN</b> .....	<b>50</b>

A. Landasan Hukum .....	50
B. Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Kementerian.....	55
1. Praktik Pembentukan Kementerian Pada Pemerintahan Prabowo Subianto .....	56
2. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Presiden Dalam Pembentukan dan Perubahan Kabinet .....	62
C. Struktur dan Jumlah Kementerian Pasca Reformasi.....	72
D. Analisis Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Penataan Struktur Kementerian.....	76
1. Ldanasan Pertimbangan dalam Pembentukan Kabinet Merah Putih ....	77
2. Indikator Efektivitas dan Evisiensi dalam Penataan Struktur Kementerian.....	81
E. Dampak Terhadap Tata Kelola Pemerintahan.....	95
<b>BAB IV PEMBENTUKAN KEMENTERIAN DALAM PERSPEKTIF.....</b>	<b>98</b>
<b><i>FIQH SIYĀSAH</i>.....</b>	<b>98</b>
A. Tinjauan <i>Maṣlahah mursalah</i> Dalam Pembentukan Kementerian Pada Masa Pemerintah Prabowo Subianto.....	98
1. Permasalahan Kabinet Gemuk: Bertentangan dengan <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	99
2. Pembentukan Kementerian Yang Tidak Berdasarkan Kebutuhan Publik Ditinjau dari <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	101
B. Dampak Kementerian Terhadap Kemaslahatan Umum.....	104
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>120</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>127</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Postur APBN Indonesia 2021-2025 .....	5
Tabel 2. Kementerian Era Pemerintahan Prabowo Subianto .....	57
Tabel 3. Daftar <i>Reshuffle</i> Kabinet Selama Era Pemerintah Prabowo Subianto .....	65
Tabel 4. Jumlah Kementerian Pasca Reformasi .....	73
Tabel 5. Susunan Pengisian Posisi Menteri dalam Kabinet Merah Putih .....	79
Tabel 6. Kementerian Yang Terkena Dampak Efisiensi Anggaran .....	93



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### i. Buku

- Asshiddiqie, Jmly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asyhadie, Zaeni, Arief Rahman, dan Mualifah. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Djazuli, A. *Kaidah - Kaidah Fikih*. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Gunardi. In *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 41. Cetakan Pertama 1. Jakarta: Damera Press, 2022.
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga. In *Fiqh & Ushul Fiqh*, 24. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Widiarty, Wiwik Sri. In *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 128–36. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Huda, Nimatul. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. (Kencana, 2017). 93
- Rahayu, Derita Prapti, M. SH, dan Sesi Ke. "Metode Penelitian Hukum." *Yogyakarta: Thafa Media* (2020): 1-25.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, (2021). 25

### ii. Jurnal, Skripsi

- Bagus Ardiansyah, M. "Analisis Pasal 15 Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2025.
- Fauziah, Safira. "Pembentukan Kabinet Zaken dalam Susunan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto Pada Periode 2024-2029." *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2024.
- Hafizd, Mohammad. "Analisis Rumusan Jumlah Kementerian Negara terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia Prespektif Siyasah Dusturiyah." *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2025.

- Marzuki, Muhamad Irfan. “Refoemasi Pengaturan Jumlah Kementerian di Indonesia (Studi Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara).” *Skripsi UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri*, 2025.
- Sampe, Stefanus. *Perbdanangan Sistem Pemerintahan*. Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2022.
- Ahmad Wahyudi Zein, Muhammad Riski, dan Allya Zahra Putri Nasution. “Efisiensi Penggunaan Anggaran Publik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* 2, no. 2 (Juni 2025): 109–18. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1027>.
- Akbar, Tri Nugroho, dan Patih Ahmad Rafie. “Reformasi Birokrasi dalam Kerangka Good Governance Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Layanan Publik.” *Jurnal Thengkyang* 9, no. 2 (2024): 201–2.
- Al Fikri Ys, Irsyad, dan Asep Fu’ad. “Peran *Maṣlaḥah mursalah* dalam Legislasi Islam Konteporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (Juli 2025): 34–35. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.
- Aprianto, Epran. “Peran Abdurahman Wahid dalam Politik di Indonesia.” *Intelektualita* 5, no. 2 (2016): 132–35.
- Arsyi, Alila, Jasmine Ubaedi, Salma Huroidhoh, Siti Atika Optafiyacha, dan Jerry Indrawan. “Tantangan Reformasi Birokrasi di Indonesia: Analisis Program Laporan Mas Wapres dalam Perspektif Good Governance.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 (Mei 2025): 9. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2421>.
- Attaji, Musyafa Ahmad, Fathul Mu’in, dan Yasin al Arif. “Hak Prerogatif Presiden Pasca Revisi Undang-Undang Kementerian Negara: Tinjauan Konstitusional Dan *Fiqh* Siyasah.” *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 2049.
- Azahwa, Syahdina Diva, Bintang Aura Meiesa, Angelia Stephanie Vadia, Huwayda Rahmania, Fadhia Chalisha Adzzahra, dan Restu Rahmawati. “Implikasi Sistem Presidensial dengan Konsep Multipartai Terhadap Stabilitas Politik di Indonesia Pada Pemilu 2024: Indonesia.” *Indonesian Journal of Law dan Justice* 2, no. 4 (June 2025): 3. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4420>.
- Badjuka, Alexdaner H., Nadya Adistya Abdul, Siti Amelia Giu, Nurlela Usman, dan Aulia Ramadania Saleh. “Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisilin* 9, no. 11 (2025): 388.

- Basri, Abdul Rahman, Muhammad Sawir, Santrio Kamaluddin, dan Rhina Pongtuluran. *Lanskap Pemerintahan: Memahami Perbedaan dan Implikasi Sistem Presidensial, Parlementer, dan Semi-presidensial*. 6, no. 1 (2024): 68–72.
- Fadhila, Alfina, Melkat Wuldanari, dan Rahma Nufiza Amalia Putri. “Rekontruksi Konsep Masalah dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Kontemporer.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (2025): 3.
- Fahira, Yumna. “Sistem Checks and Balances Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025): 4–5.
- Faried, Ade, Putri Marzaniar, dan Siti Nurzalikha. “Komparasi Kepemimpinan Presiden Sby dan Jokowi Dalam Mitigasi Amdal di Indonesia.” *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 11, no. 2 (November 2025): 177–78. <https://doi.org/10.25299/jiap.2025.22378>.
- Fauzi, Ahmad. *Pembatasan Kewenangan Penambahan Kementerian Negara Oleh Presiden (Pembentukan Kabinet Merah Putih Oleh Presiden Prabowo Subianto)*. 1, no. 2 (2024): 65.
- fazilla, Mutia, Syarfina Sahnah, Yoldanari, Putri Febri Wialdi, Yulia Hanoselina, dan Jumiaty. “Tumpang Tindih Kewenangan Antara Kementerian: Tantangan Koordinasi Dalam Kabinet Yang Ekspansif.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 12 (2025): 18671.
- Firdaus Arifin. “Pembentukan Kabinet dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia: Studi Komparasi UUD 1945 Sebelum dan Setelah Perubahan.” *Lex Renaissance* 9, no. 2 (Desember 2024): 333–34. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art5>.
- Gultom, Deby Novalia, Etika Khairina, dan Lubna Salsabila. “Analisis Efisiensi dan Efektivitas E-Government dalam Administrasi Publik.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 10, no. 1 (2024): 132.
- Gusman, Delfina. “Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (November 2024): 655–65. <https://doi.org/10.31933/xb14st09>.
- Halla Tiaranissa dan Nailatul Fitriah. “Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis.” *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (June 2025): 321–23. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539>.

- Hertanto, Yudhi, Iqlima Zahari, Fatma Faisal, dan Johannes Triestanto. “Kebijakan Publik Pemerintah dalam Perspektif Masalah dan Prinsip Negara Hukum.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 1 (2026): 1455–56.
- Ipan Nurhidayat. “Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia.” *Journal Education dan Government Wiyata* 1, no. 1 (Februari 2023): 42–49. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>.
- Jamil, Arnita. “Sistem Pemerintahan Presidensial dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 02 (2020): 194–95. <https://doi.org/10.56196/jta.v10i02.163>.
- Kurniawati, Dian, dan Elva Imeldatur Rohmah. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Prinsip Checks dan Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2024): 185–89.
- Madjid, Mario Agritama S. W. “Politik Hukum Pembatasan Hak Perogratif Presiden dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara.” *Constitution Journal* 1, no. 2 (Desember 2022).
- Maskur, Afif Ali Shofiyah, Zaky Satria Adam Aryanto, Muhammad Vairuz Zamzami, dan Farel Indrasta. *Trias Politica: Considering The Impact Of The Absence Of The Trias Politica In A Country*. 1, no. 02 (2024): 6–8.
- Muhamad Khoerul Umam. “Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik Perspektif *Maṣlahah mursalah*.” *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 1 (Februari 2024): 204. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16204>.
- Muhammad Haqiqi, Erldan Ferdinansyah, dan Kahlil Rida. “Meritokrasi dan Pengaruh Partai Politik dalam Jabatan di Kementerian: Studi Analisis Kementerian Kabinet Merah Putih 2024-2029: Meritocracy dan the Influence of Political Parties in Ministerial Positions: An Analysis Study of the 2024-2029 Merah Putih Cabinet.” *JAPHTN-HAN* 3, no. 2 (Desember 2024): 149–66. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i2.163>.
- Pangaribuan, Refo Rivaldo Fransiscus, Toar Neman Palilingan, dan Feiby S. Wewengkang. “Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.” *Lex Administratum* 12, no. 5 (2023): 7–8.
- Prahasti Suyaman. “*Maṣlahah mursalah* sebagai Salah Satu Metode Istinbath.” *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (Februari 2025): 421.
- Pratiwi, Cekli Setya, Christina Yulita, Fauzi, dan Shinta Ayu Purnamawati. “Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik.” *Judicial Sector Support Program*, 2016, 53–75.

- Putri, Zuwindah Herika, Lutfi Fahrul Rizal, dan Aji Saptaji. "Analisis Perubahan Struktur dan Pengisian Jabatan Kementerian dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Menurut Konsep Ahlul Halli Wal Aqdi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4064.
- Ramadhan, Febriansyah, dan Saiful Risky. "Presidential Power Dan Executive Aggrdanizement In Shaping The Cabinet." *Veritas et Justitia* 11, no. 2 (Januari 2026): 284.
- Ramadhan, Muhammad Ridha, dan Mirza Satria Buana. "Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 2398–404.
- Ridwan. "Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (Februari 2022): 833. <https://doi.org/10.31078/jk1845>.
- Ridwan, Rudini. "Indonesia Pada Masa Pemerintahan B.J Habibie (1998-1999)." *Pattingalloang: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kesejarahan* 2, no. 1 (2021): 200–203.
- Sabrina, Amdana Feby, Rifansyah Nugraha, dan Achmad Hanif Avicenna. "Analisis Hukum Partai Politik dalam Koalisi Kabinet Prabowo-Gibran." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, no. 4 (2024): 4–5.
- Sari, Ayumi Kartika. "Pengaruh Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia* 2, no. 02 (June 2023): 353–54. <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.241>.
- Simabura, Charles, Beni Kurnia Illahi, dan Muhammad Ichsan Kabullah. "Presidential Power in the Formation of Cabinet Posture after the State Ministries Law 2024." *Journal of Advanced Law dan Governance* 1, no. 2 (2024): 65–66.
- Sunarto, Sunarto. "Prinsip Checks dan Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *MASALAH-MASALAH HUKUM* 45, no. 2 (April 2016): 160. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.
- Syamsuddini, M. Najich. "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)." *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 7, no. 2 (Mei 2022): 106.
- Tjandra, Riawan. "Pergeseran Konsep Kelembagaan Kementerian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (Desember 2024): 478. <https://doi.org/10.55292/hw800w44>.

- Wahyudi Akhmad Albarqi dan Aminullah Aminullah. "Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem." *Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi* 3, no. 1 (January 2026): 24–34. <https://doi.org/10.62383/studi.v3i1.899>.
- Tungga, Benyamin, Jamil Jamil, dan Imam Sukadi. "Implikasi Hukum Restrukturisasi Kelembagadanan Pembentukan Kementerian Baru dalam KerangkaTata Kelola Pemerintahan Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 9.2 (2026)
- Wicaksono, Fahmi Nur. "Politik Hukum Penambahan Kementerian dan Transformasi Sistem Pemerintahan Indonesia pada Era Joko Widodo dan Prabowo Subianto." *Jurnal Tana Mana* 6.2 (2025)
- Christian Krisna Bayu, Nugraha. "Strategi Partai Gerindra Provinsi Lampung dalam Pemenangan Prabowo Subianto Sebagai Presiden Indonesia 2024-2029." Universitas Lampung (2024).
- Budiman, Haris, dkk. "Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terhadap efektivitas dan kinerja pemerintahan daerah." *Justicia Journal* 14.2 (2025): 187-197.
- Qosim, Sarah, dkk. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal Pasca Regulasi UU Ketenagakerjaan Studi Siyāsah Shar'iyah." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4.3 (2023): 1-23.
- Sembiring, Surya Abadi. *Perkembangan Kebijakan Perberasan Berdasarkan Instruksi Presiden: Tujuan-Kendala-Instrumen dan Implementasinya (Edisi Revisi)*. Penerbit NEM, 2025.
- Fauzan, AHMAD FAUZAN. *Analisis Yuridis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Organisasi Yang Dibiayai Dari Dana APBN dan APBD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*. Diss. Universitas Jambi, 2025.
- Sulkiah, Sulkiah. "Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 Amdanemen Suatu Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Nurani Hukum* 2.1 (2020): 42-52.
- Hidayat, Dayat. "Kabinet Gotong Royong." *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik* 4.3 (2020).25
- Awatra Meizar, Arya. *Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Iindonesia Maju dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*

*Perspektif Siyasa Dusturiyah*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.

Wijaya, Junior Hendri, dan Iman Amdana Permatasari. "Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie dan Megawati di Indonesia." *Cakrawala* 12.2 (2018): 196

Yosi Aryanti, "Hubungan Tingkatan Masalah dalam Maqasid Al-Syari'ah (Masalah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, AL-Tahsiniyat dengan AL-Ahkam AL-Khamsah," *El-Rusyd* 10, no. 2 (2025): 40–45.

Ferdano, Fransisco Frisco, dan Chrysno Fambrio Siletty. "Penerapan Sistem Pemerintahan Indonesia." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 4.1 (2024): 232-238.

Hermanto, Agus. "Konsep masalah dalam menyikapi masalah kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)." *Al-'Adalah* 14.2 (2017): 433-434

Haqiqi, Muhammad, Erldan Ferdinansyah, dan Kahlil Rida. "Meritokrasi dan Pengaruh Partai Politik dalam Jabatan di Kementerian: Studi Analisis Kementerian Kabinet Merah Putih 2024-2029: Meritocracy dan the Influence of Political Parties in Ministerial Positions: An Analysis Study of the 2024-2029 Merah Putih Cabinet." *JAPHTN-HAN* 3.2 (2024): 149-166.

Suyati, Suyati, dan Budiyo Budiyo. "Dinamika Koalisi dan Efektivitas Kepemimpinan pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto." *Jurnal Tana Mana* 6.2 (2025): 374-383.

Erlangga, Erlangga Dwi Prayata Helman. *Pergeseran Paradigma Penggunaan Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Menteri*. Diss. Universitas Danalas, 2025.

Afrizal, Mohammad, dkk. "Reshuffle Kabinet dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Inicio Legis* 5.2 (2024): 16-27.

Nabila, Putri. "Article Efektivitas Audit Kinerja Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance melalui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik." *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita* 5.1 (2025): 1-11.

Kennya, Shafaa Kaila. "Implementasi Kebijakan Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 di Sekretariat Daerah Kota Tangerang." (2025). 30

Tungga, Benyamin, Jamil Jamil, dan Imam Sukadi. "Implikasi Hukum Restrukturisasi Kelembagaan Pembentukan Kementerian Baru dalam

KerangkaTata Kelola Pemerintahan Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 9.2 (2026): 830-853.

Pratiwi, Dini Maria, Muh Ilham, and Wangsih Wangsih. "Efektivitas Diklat Aparatur Sipil Negara pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung Kementerian dalam Negeri." *ABDIMOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6.1 (2023): 57-69.

Day, George Soros Setiawan, and Siti Fatimah. "Perampangan Struktur Kelembagaan Negara: Antara Efektivitas dan Efisiensi." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5.3 (2025): 289

Abidin, Zainal, and Abdul Syatar. "Eksistensi al-Maṣlaḥah al-Mursalah dalam Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah." *Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review* 4.2 (2024). 21-23

### iii. Peraturan Perundang Undangan, Keputusan Presiden

Undang Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang Undang No 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 39 Tahun 2008

Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029

Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara

### iv. Putusan Pengadilan

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 201/PUU-XXIII/2025," tanggal Oktober 2025.

### v. Data Elektronik

*Antara Indonesia News Agency*. "Prabowo Pledges 20,000 Troops for UN Peacekeeping Missions." September 24, 2025. Akses 6 Februari 2026 Edition. [https://en.antaranews.com/news/381957/prabowo-pledges-20000-troops-for-un-peacekeeping-missions?utm\\_source](https://en.antaranews.com/news/381957/prabowo-pledges-20000-troops-for-un-peacekeeping-missions?utm_source).

Arianto, Ony. "Dosen Fisip Unair Soroti Kabinet Merah Putih." *Radio Republik Indonesia* (Surabaya), 2024. Akses 5 Februari 2026 Edition. <https://rri.co.id/daerah/1072806/dosen-fisip-unair-soroti-kabinet-merah-putih>.

Christian, Immanuel. "Risiko Tumpang Tindih Kebijakan dalam Kabinet Prabowo." *Alinea.Id*, 2024. Akses 5 Januari 2026 Edition.

<https://www.alinea.id/bisnis/risiko-tumpang-tindih-kebijakan-dalam-kabinet-prabowo-b2kGg9QHm>.

Evdanio, Akbar. "Sri Mulyani Berhitung Anggaran untuk Antisipasi Kabinet Gemuk Prabowo." *Kabar 24*, Oktober 2024. Akses 7 Februari 2026 Edition. <https://kabar24.bisnis.com/read/20241018/15/1808740/sri-mulyani-berhitung-anggaran-untuk-antisipasi-kabinet-gemuk-prabowo>.

"Informasi APBN 2021- 2025." Kementerian Keuangan RI, akses Desember 2025. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a760f574-2f6a-4d7a-b811-5fe4e92ee38a/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2021-2025.pdf?ext=.pdf>.

*Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi* (Jakarta). "Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: Stabil, Produktif, dan Berdampak Nyata Untuk Rakyat." 2025. Akses 15 Januari 2026 Edition. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/setahun-pemerintahan-presiden-prabowo-subianto-stabil-produktif-dan-berdampak-nyata-untuk-rakyat>.

*Kompas. Com* (Jakarta). "Ini Alasan Prabowo Rombak Kabinet Merah Putih." 2025. Akses 4 Januari 2026 Edition. <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-alasan-prabowo-rombak-kabinet-merah-putih>.

Kurniawati, Dhita. "Efisiensi Anggaran Jadi Terobosan Fiskal Pemerintahan Prabowo-Gibran." *Harian Ekonomi Neraca*, Oktober 2025. Akses 7 Februari 2026 Edition. <https://www.neraca.co.id/article/226712/efisiensi-anggaran-jadi-terobosan-fiskal-pemerintahan-prabowo-gibran>.

Mardianti, Dede Leni. "Alasan Prabowo Pecat Immanuel Ebenezer Sebagai Wamenaker." *Tempo*, Agustus 2025. Akses 5 Februari 2026 Edition. <https://www.tempo.co/politik/alasan-prabowo-pecat-immanuel-ebenezer-sebagai-wamenaker-2062113>.

Mardianti, Dede Leni, Riri Rahayu, Sultan Abdurrahman, Ervana Trikarinaputri, dan Adil Al Hasan. *Rekonstruksi Anggaran 2025, Pemangkasan Di 13 Kementerian dan Lembaga Hemat Ratusan Triliun*. Akses 8 Januari 2026 Edition. 2025. Akses 8 Januari 2026 Edition. <https://www.tempo.co/politik/rekonstruksi-anggaran-2025-pemangkasan-di-13-kementerian-dan-lembaga-hemat-ratusan-triliun-1207988>.

*Media Dakwah & Kajian Islam*. "Konsep Masalah dalam Ushul Fikih dan Penerapannya." akses Desember 2025. <https://tatsqif.com/konsep-masalah-dalam-ushul-fikih-dan-penerapannya-simak/>.

*Ringkasan RPJMM Tahun 2025-2029*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025.

Salim, Mabruki Pudyas. "10 Contoh *Maslahah mursalah* Sejak Zaman Sahabat Nabi Hingga Sekarang, Ketahui Syaratnya." *Liputan6*, akses Desember 2025 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5303783/10-contoh-maslahah-mursalah-sejak-zaman-sahabat-nabi-hingga-sekarang-ketahui-syaratnya?page=4>.

*Tempo*. "Pengamat Anggap Banyaknya Menteri Kabinet Prabowo Tidak Efisien Dan Boros Anggaran." Oktober 2024. Akses 7 Februari 2026. <https://www.tempo.co/politik/pengamat-anggap-banyaknya-menteri-kabinet-prabowo-tidak-efisien-dan-boros-anggaran-816529>.

Trikarina Putri, Ervana. "Prabowo 4 Kali *Reshuffle* Kabinet Sepanjang 2025." *Tempo*, 2026. Akses 5 Januari 2026. <https://www.tempo.co/politik/prabowo-4-kali-reshuffle-kabinet-sepanjang-2025-2104293>.

Wafa, Izzul. "Naik Turun Jumlah Kementerian Sejak Era Reformasi 1998." *Good Stats*, 2025. Akses 6 Januari 2026 Edition. <https://data.goodstats.id/statistic/naik-turun-jumlah-kementerian-sejak-era-reformasi-1998>.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A